

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Perbedaan demografi, geografi, sumber daya manusia dan lain sebagainya memang menciptakan keberagaman yang khas di setiap wilayah Indonesia. Keberagaman tersebut tak jarang dapat memunculkan dampak negatif. Salah satu masalah yang muncul dalam bidang sosial ekonomi yakni kemiskinan. Kemiskinan yang dapat diartikan sebagai ketidakmampuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup, sudah menjadi masalah klasik yang terdengar hingga kini walaupun telah diupayakan untuk diatasi. Upaya yang dilakukan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan menjadi prioritas pemerintah hingga kini dan salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi yang dilakukan.

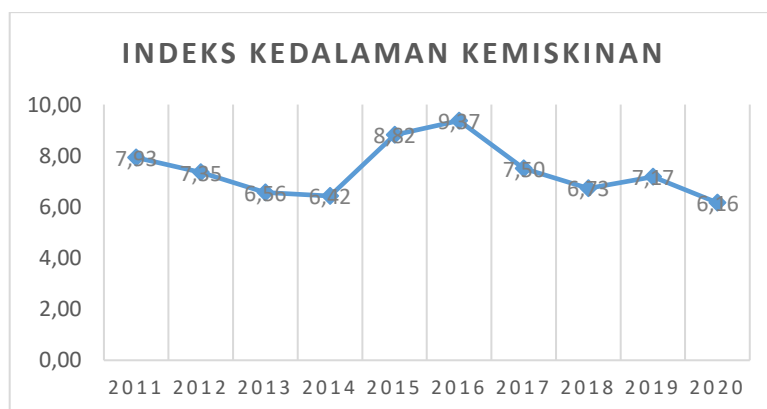
Pembangunan ekonomi penting dijalankan secara merata dan terukur di setiap provinsi di Indonesia. Namun mengingat keberagaman wilayah mengakibatkan setiap provinsi memiliki tingkat kemiskinan berbeda-beda. Jika merujuk UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berisi setiap warga negara berhak untuk dapat penghidupan layak. Ini mengartikan bahwa pemerintah dalam tugasnya menjamin kesejahteraan rakyat agar dapat memastikan di setiap provinsi mendapatkan pemenuhan hak yang sama sebagai bentuk representasi sila ke lima pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemenuhan hak sama ini salah satunya dapat dilakukan dengan upaya penurunan kemiskinan diseluruh wilayah dan memberi perhatian lebih terhadap wilayah atau provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi atau dengan kata lain memikirkan prioritas pembangunan.

Papua menjadi salah satu provinsi dengan masalah kemiskinan tertinggi di Indonesia, ditengah segala upaya pengentasan yang dilakukan seperti halnya disampaikan oleh Menteri desa tertinggal, yang menaruh fokusnya terhadap penanganan kemiskinan ekstrim kepada tujuh provinsi di Indonesia yang salah satunya adalah Papua melalui berbagai strategi. Hal ini menunjukkan Papua

selalu mejadi salah satu provinsi yang diperhatikan agar terjadi pemerataan pembangunan ekonomi. Dimana dalam hal ini juga dapat dilihat dengan adanya penggelontoran dana otonomi khusus yang diberikan untuk Papua sejak tahun 2002 sampai 2020 saja, Papua dan Papua Barat sudah mendapat dana otonomi khusus hingga Rp94,24 triliun yang mana hampir setiap tahunnya meningkat untuk dapat mempercepat pembangunan (Kementerian Sekretariat Republik Indonesia Negara, 2020). Namun dalam beberapa pengukuran kemiskinan, Papua tetap menjadi provinsi dengan masalah kemiskinan yang tinggi.

Dalam dimensi indeks kedalaman kemiskinan, dapat dilihat pada beberapa kabupaten di provinsi papua memiliki indeks kedalaman yang tinggi, menandakan di daerah tersebut penduduknya memiliki penghidupan yang jauh dibawah garis kemiskinan. Setidaknya ada 6 kabupaten di Papua dengan indeks kedalaman kemiskinan terbesar yakni kabupaten Lanny Jaya dengan nilai indeks 14,87 pada maret 2021, yang mana angka tersebut merupakan terbesar secara nasional dan jauh diatas rata-rata secara nasional sebesar 1,71. Selanjutnya diikuti dengan kabupaten Yalimo dengan indeks 13.86, Jayawijaya sebesar 12,89, Puncak jaya sebesar 12,4 Nduga sebesar 11,89, dan Puncak sebesar 9,92 (Kusnandar, 2022).

Gambar 1-1 Indeks Kedalaman Kemiskinan Papua 2011-2020



Sumber: Peneliti dari Badan Pusat Statistik

Indeks kedalaman kemiskinan di Papua terjadi fluktuasi tahun ke tahun. Jika melihat perbandingan antara tahun 2011 dan 2020 Papua sudah mengalami penurunan sebesar 1,77 mengindikasikan terjadi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit dan rata-rata pengeluaran cenderung mendekati garis kemiskinan yang dapat diartikan sudah ada perkembangan daerah yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Namun, pada data indeks kedalaman kemiskinan tahun 2015 dan 2016 sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni dari 6,42 pada 2014 menjadi 8,82 pada 2015 dan terus meningkat menjadi 9,37 pada 2016. Hal ini menunjukkan belum tercapainya konsistensi angka penurunan yang terjadi pada perjalanannya, hal ini menandakan bisa saja dikemudian hari terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan di Papua terlebih lagi pada masa pandemic atau masa setelahnya yang memerlukan konsistensi dalam memperkuat keadaan ekonomi. Selain itu jika melihat dari data secara nasional, Papua menjadi provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi selama 10 tahun kebelakang ini yakni 2011-2020, pada tahun 2020 saja Papua berada pada indeks sebesar 6,16 berbeda jauh dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah yakni provinsi Bali sebesar 0.52 pada tahun 2020 (Taufiq et al., 2020).

Oleh karena adanya masalah tersebut, perlu diketahui faktor-faktor yang mengakibatkan kedalaman kemiskinan di Papua. Namun sebelum itu, perlu diidentifikasi faktor yang mengakibatkan kemiskinan secara umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti diberbagai negara yang salah satunya dalam penelitiannya disebutkan bahwa faktor tingkat pertumbuhan yang tinggi memiliki dampak negatif yang besar terhadap kemiskinan dan pendidikan dapat berdampak jangka panjang terhadap kemiskinan, dimana pendidikan membantu dalam pemberantasan kemiskinan dan pengembangan status sosial masyarakat dan ekonomi (Dagume, 2021).

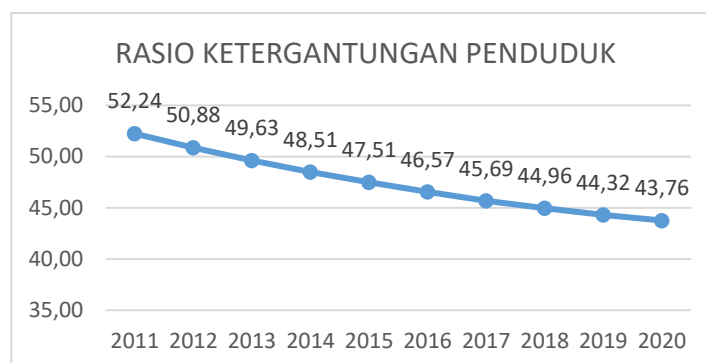
Penelitian lainnya mengenai faktor yang mengakibatkan kemiskinan menemukan hasil pertumbuhan ekonomi berdampak negatif pada kemiskinan. Berdasarkan penelitian ini dapat mengimplikasikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif pada pengentasan kemiskinan, dimana melalui

pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kebijakan kenaikan upah minimum (Rachman et al., 2020). Selain itu penelitian lain menyatakan sejumlah penyebab yang mempengaruhi kemiskinan antara lain kurangnya modal untuk produksi, kurangnya alat produksi, buruknya kesehatan dan tenaga kerja yang kurang, keluarga besar, kesempatan kerja yang kurang atau pengangguran, kemauan yang kurang untuk lepas dari kemiskinan serta pendidikan (Nguyen & Van Nguyen, 2019). Dan dari penelitian ditunjukkan juga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yakni faktor Rasio Ketergantungan Penduduk, konsumsi rokok, dan pengangguran terbuka terdapat pengaruh signifikan dalam jangka panjang pada persentase penduduk miskin. Sedangkan faktor yang signifikan dalam jangka pendek adalah Rasio Ketergantungan Penduduk dan tingkat pengangguran terbuka (Wintara et al., 2021).

Dari hasil penelitian sebelumnya tersebut yang menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti halnya dalam aspek pendidikan, demografi, ketenagakerjaan, PDB/PDRB, dan lain sebagainya. Sehingga pada penelitian faktor-faktor yang diduga berpengaruh yakni dari aspek demografi, pendidikan dan ekonomi. Aspek tersebut pada studi ini memakai ketergantungan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan PDRB menjadivariabel yang mempengaruhi kedalaman kemiskinan.

Rasio Ketergantungan Penduduk menjadi indikator yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi pada suatu wilayah. Rasio Ketergantungan Penduduk dimaknai sebagai perbandingan jumlah usia angkatan kerja dengan jumlah usia bukan angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2020a). Dimana makin tinggi persentase ketergantungan penduduk, mengartikan makin berat bagi penduduk produktif untuk menghidupi penduduk belum produktif dan sudah tidak produktif. Sebaliknya, dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk mengartikan bahwa banyak penduduk yang produktif yang dapat menaikan jumlah tabungan penduduk yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya menurunkan kemiskinan.

Gambar 1-2 Rasio Ketergantungan Penduduk Papua Tahun 2011-2020



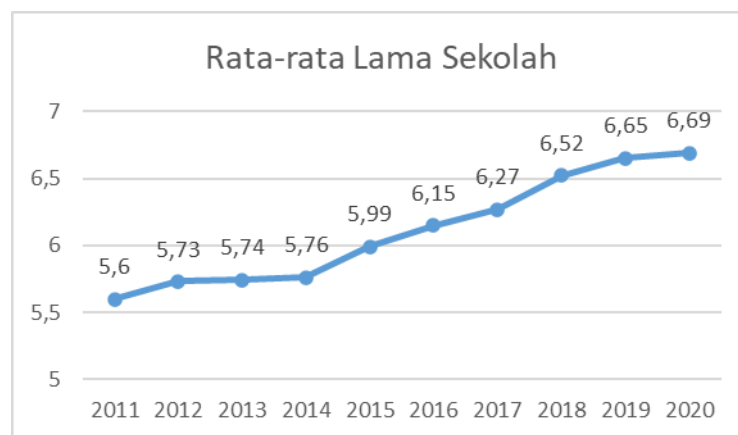
Sumber: Peneliti dari Badan Pusat Statistik

Dari data menunjukkan adanya penurunan secara terus menerus Rasio Ketergantungan Penduduk dari tahun ketahun di provinsi papua yang mana jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 penurunannya sebesar 0,56 dan jika dibandingkan tahun 2011 dengan 2020 maka penurunannya sebesar 8,48 ini menandakan semakin banyak penduduk usia produktif yang ada di provinsi papua. Data tersebut jika dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan tidak sejalan dengan konsep ekonomi. Dimana data tersebut tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang mengalami fluktuasi sedangkan Rasio Ketergantungan Penduduk selalu mengalami penurunan dari tahun ketahun. Dalam beberapa penelitian juga menemukan hasil yang berbeda tentang pengaruh atau hubungan rasio ketergantungan penduduk dengan kemiskinan, menurut penelitian bahwa rasio ketergantungan penduduk menghasilkan pengaruh signifikan pada kemiskinan secara parsial dan simultan (Yustie, 2020). Kemudian, diperkuat kembali dalam penelitian disebutkan secara parsial variabel Rasio Ketergantungan Penduduk mempunyai pengaruh positif dan nyata pada Kemiskinan (Pribowo & Suprpto, 2021). Namun berbeda dalam penelitian yang mengatakan bahwa secara parsial Rasio Ketergantungan Penduduk dan tidak terdapat pengaruh angkatan kerja pada kemiskinan (Krisna & Destiningsih, 2021).

Selanjutnya faktor kedua, rata-rata lama sekolah dimaknai dengan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan usia penduduk 15 tahun ke atas, yang mengikuti

semua jenjang pendidikan (Subektianto, 2020). Dimana rata-rata lama sekolah dijadikan salah satu ukuran atau representasi pendidikan di Indonesia. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa kemiskinan dapat dikurangi oleh rata-rata lama sekolah. Seperti halnya menurut penelitian, lama sekolah rata-rata mempunyai dampak signifikan pada tingkat kemiskinan di Jambi (Syabrina et al., 2021). Ini sehubungan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat kuat menjelaskan bahwa makin tinggi tahun ajaran secara rata-rata, makin rendah persentase penduduk miskin. Selain itu, rata-rata lama sekolah juga berpengaruh signifikan pada penduduk miskin (Hadi, 2019). Namun, pada penelitian lain diketahui bahwa pendidikan dalam hal ini adalah rata-rata lama sekolah mengidentifikasi pengaruh positif dan tidak signifikan kedalam pengurangan kemiskinan dan menambah kemiskinan (Wulandari et al., 2019).

Gambar 1-3 Rata-rata lama sekolah di Papua Tahun 2011-2020

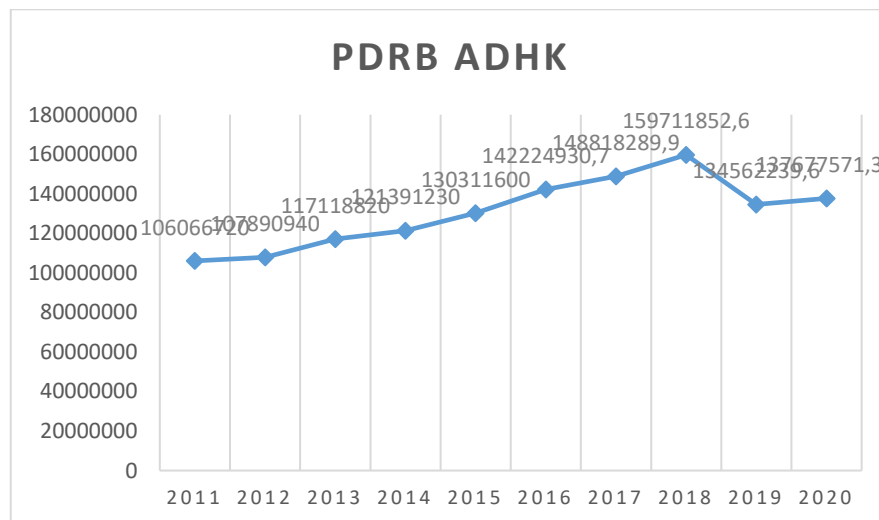


Sumber: Peneliti dari Badan Pusat Statistik

Dari data Papua diatas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ketahun, yang jika dilihat selama 10 tahun terakhir rata-rata lama sekolah dari awal 2011 sebesar 5,6 sampai kemudian tahun 2020 menjadi 6,69 yang berarti meningkat sebesar 1,09. Peningkatan terus menerus ini dapat mengartikan bahwa penduduk di Papua secara rata-rata sudah semakin mendekati jumlah tahun yang digunakan untuk mendapatkan pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

Kemudian faktor ketiga adalah PDRB ADHK yang bertujuan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dan melacak perubahan pendapatan agregat tahun ke tahun. Dalam penelitian disebutkan bahwa PDRB mempunyai negatif signifikan pengaruh pada kemiskinan (Mahatma Avigna et al., 2022). Selain itu, dalam penelitian diperoleh lain diperoleh hasil yang menyatakan variabel signifikan yang diperoleh adalah PDRB ADHK dan TPAK (Asrani, 2020). Namun, berbeda dengan hasil dari penelitian yang menyebutkan dimana secara parsial, PDRB mempunyai pengaruh positif tidak signifikan pada kemiskinan (Sudibia, 2020).

Gambar 1-4 PDRB ADHK Papua Tahun 2011-2020



Sumber: Peneliti dari Badan Pusat Statistik

Dari PDRB Papua diatas, Papua mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami kenaikan dari Rp 106.066.720 pada tahun 2011 dan pada di tahun 2018 menjadi Rp159.711.852. selanjutnya, sempat terjadi penurunan menjadi Rp134.562.239 ditahun 2019 yang selanjutnya kembali mengalami peningkatan kembali pada 2020 di angka Rp 137.677.571.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian penting dijalankan agar dapat teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan di Papua karena menjadi provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan

tertinggi selama 10 tahun terakhir (2011-2020). Selain itu adanya gap data dan riset terdahulu serta belum adanya penelitian sebelumnya yang menggunakan kurun waktu 10 tahun sebagai tindak lanjut penelitian sebelumnya yang serupa maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan di Papua Tahun 2011-2020”**.

1.2.Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diberikan diatas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah ada pengaruh Rasio Ketergantungan Penduduk terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua
2. Apakah ada pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua
3. Apakah ada pengaruh PDRB ADHK terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua

1.3.Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan pertanyaan penelitian, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya pengaruh Rasio Ketergantungan Penduduk terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua
2. Mengetahui besarnya pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua
3. Mengetahui besarnya pengaruh PDRB ADHK terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Papua.

1.4.Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis berdasarkan tujuan yang disebutkan di atas, sehingga memperluas pemahaman tentang masalah sosial ekonomi di masyarakat. Beberapa manfaat atau keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mampu menghasilkan informasi keadaan sosial ekonomi terutama masalah kemiskinan yang dikaitkan dengan rasio ketergantungan penduduk, rata-rata lama sekolah dan PDRB di Papua guna menambah wawasan masyarakat terhadap perkembangannya dan mampu ikut serta membangun dan atau mendukung pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Penelitian dapat membantu proses pengambilan keputusan tentang penerapan kebijakan yang berkaitan dengan masalah ini dengan memberikan perspektif atau bahan pertimbangan.
3. Penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian terkait dengan masalah kedalaman kemiskinan ini.